

Mengapa Harga TBS Petani Swadaya Belum Beranjak Naik Pasca-B50?

Diagnosis lima lapis pemutus transmisi harga — dari pungutan ekspor hingga timbangan tengkulak — beserta anatomi harga, skenario 6–18 bulan, dan agenda aksi 100 hari / 18 bulan / 5 tahun.

Edisi: Juli 2026 (basis data per 22 Juli 2026)

Basis riset: 4 jalur riset paralel · 35+ sumber primer (regulasi, data asosiasi, pemberitaan, studi akademik)

Catatan penggunaan

Dokumen ini adalah kajian kebijakan dan tata niaga berbasis sumber publik per 22 Juli 2026. Angka harga bersifat periodik dan dapat berubah; seluruh sumber dicantumkan pada Daftar Sumber. Bukan merupakan nasihat investasi.

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif

1. Konteks — Janji B50: Energi Berdaulat, Petani Sejahtera
2. Fakta — Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Harga
3. Diagnosis — Lima Lapis Pemutus Transmisi Harga
4. Anatomi Harga — Ke Mana Perginya Selisih Itu
5. Skenario 6–18 Bulan ke Depan
6. Agenda Aksi — Rekomendasi per Horizon dan Aktor
7. Risiko Implementasi dan KPI Pemantauan
8. Metodologi dan Batasan Kajian

Daftar Sumber

Ringkasan Eksekutif

B50 sudah bekerja — tetapi hasilnya berhenti di tengah jalan. Mandatori biodiesel B50 resmi berlaku 1 Juli 2026 dan diresmikan Presiden Prabowo pada 9 Juli 2026 dengan tolok ukur eksplisit: kesejahteraan petani. Tiga pekan berjalan, harga penetapan TBS Disbun memang naik — Riau mencapai Rp3.832,75/kg (15–21 Juli) dan Sumut Rp3.925,49/kg. Namun mayoritas petani swadaya tidak merasakannya: harga riil yang diterima petani non-mitra di tingkat pabrik dan tengkulak berkisar Rp2.700–3.400/kg, tertinggal 12–30% dari harga penetapan. Pertanyaan yang tepat karenanya bukan “mengapa B50 gagal menaikkan harga”, melainkan **“mengapa kenaikan harga yang diciptakan B50 tidak pernah sampai ke gerbang kebun petani swadaya”**.

Jawaban kajian ini: transmisi harga terputus di lima lapis sekaligus.

- **Lapis 1 — Baji fiskal.** B50 dibiayai pungutan ekspor (PE) yang dinaikkan dua kali dalam 14 bulan menjadi 12,5% (Maret 2026), plus bea keluar US\$148/ton — total $\pm 27\%$ dari harga referensi CPO. SPKS menghitung beban ini setara pemotongan $\pm \text{Rp}833/\text{kg}$ TBS. Dalam desain fiskal saat ini, petani ikut membiayai subsidi biodiesel yang insentifnya dinikmati produsen FAME.
- **Lapis 2 — Sumbatan transmisi domestik.** Harga tender KPBN — acuan formula TBS — lengket di Rp15.545–15.700/kg sepanjang Juli meski pasar global menguat; banyak tender berakhir withdraw. Studi ekonometrik 2010–2021 membuktikan transmisi CPO→TBS asimetris: saat CPO turun, TBS jatuh cepat; saat CPO naik, TBS lambat menyusul.
- **Lapis 3 — Eksklusi kelembagaan.** Harga penetapan provinsi hanya mengikat transaksi kemitraan (Permentan 13/2024, penerus logika Permentan 01/2018). Apkasindo memperkirakan hanya $\pm 6,8\%$ petani menikmati harga penetapan; di Riau, 97% petani berstatus swadaya. Di Kalteng, bahkan harga penetapan resmi untuk swadaya 8,4% di bawah plasma.
- **Lapis 4 — Rantai perantara dan praktik pasar.** 83% petani kecil menjual lewat 2+ lapis tengkulak; akses ke pabrik dikuasai pemegang DO. Potongan timbangan 9–12% dan sortasi sepihak lazim. Kasus Pesisir Selatan (petani menerima $\pm \text{Rp}3.000$ vs penetapan Rp4.180/kg) kini diselidiki KPPU atas dugaan kartel; Kementan telah mengultimatum 139 PKS dan memeriksa 300 perusahaan.
- **Lapis 5 — Jerat struktural kebun swadaya.** Produktivitas sepertiga potensi; banyak kebun memakai benih Dura (rendemen 14,4% vs Tenera 20,2%); PSR hanya terealisasi 34 ribu ha dari target 120–180 ribu ha/tahun; 67% petani belum ber-STDB; <1% swadaya ber-ISPO. Tanpa legalitas dan mutu, petani terkunci pada jalur tengkulak dengan posisi tawar terendah.

Konteks memperberat: momentum pasar sedang melemah — stok CPO nasional 3,04 juta ton (akhir Mei, tertinggi), ekspor Mei -28% m/m, impor India terendah 14 bulan, produksi nasional $+10,7\%$ ytd. Rupiah yang melemah ke $\pm \text{Rp}17.950/\text{US\$}$ (-10% setahun) justru menambah rupiah per dolar CPO yang diekspor — membuat stagnannya harga petani makin janggal. B50 berhasil menahan harga domestik di atas paritas netback ekspor (KPBN Rp15.700 vs netback $\pm \text{Rp}13.060/\text{kg}$), tetapi baji fiskal membuat harga domestik tetap terdiskon $\pm \text{Rp}2.270/\text{kg}$ (-13%) dari harga referensi CPO ($\pm \text{Rp}17.970/\text{kg}$).

Rp2.700–3.400 Harga riil TBS petani swadaya non-mitra, Juli 2026 — vs harga penetapan Rp3.750–3.925 (gap 12–30%)	±6,8% Petani yang menikmati harga penetapan pemerintah (klaim Apkasindo); 93% lainnya bergantung harga pabrik/tengkulak	–Rp833/kg Estimasi SPKS: dampak beban pungutan ekspor 12,5% terhadap harga TBS petani
±27% Total beban fiskal ekspor (BK US\$148 + PE 12,5% ≈ US\$273/ton) terhadap harga referensi CPO Juli 2026	Rp15.700/kg Harga tender KPBN (17 Juli) — lengket, vs harga referensi CPO ±Rp17.970/kg	1,7% vs 30% Gap harga swadaya terlembaga di Riau (vs plasma) dibandingkan gap swadaya non-mitra — bukti kelembagaan bekerja

Lima langkah yang paling menggerakkan jarum (detail di Bab 6):

- **Jadikan harga penetapan sebagai harga minimum untuk semua transaksi PKS** — mitra maupun non-mitra — dengan sanksi dipublikasikan mingguan. Dampak tercepat: +Rp300–600/kg bagi petani non-mitra.
- **Audit dan reformasi tender KPBN** (fenomena withdraw), lalu migrasi bertahap ke acuan bursa yang likuid dan tak bisa “ditahan”.
- **Bayarkan “dividen B50” ke hulu:** tahan PE di 12,5% (moratorium kenaikan 12 bulan), realokasi dana BPD PKS untuk insentif harga TBS ber-STDB/ISPO dan akselerasi PSR.
- **Korporatisasi petani swadaya:** target 30% petani tercakup harga penetapan dalam 18 bulan (dari ±6,8%) melalui kelembagaan ber-DO langsung — jalur yang terbukti memangkas gap menjadi ±1,7% di Riau.
- **Bangun infrastruktur transparansi:** dashboard harga riil vs penetapan di 168 kabupaten sentra dan kewajiban publikasi uji rendemen per PKS.

Satu kalimat untuk pengambil keputusan

B50 telah menciptakan permintaan; yang belum dibangun adalah tata niaga yang mengantarkan harganya sampai ke petani — selama lima lapis kebocoran ini dibiarkan, setiap kenaikan mandatori (B60, B100) hanya akan memperbesar selisih yang dinikmati perantara dan menambah beban fiskal yang justru dipikul petani.

1. Konteks — Janji B50: Energi Berdaulat, Petani Sejahtera

B50 adalah kebijakan energi terbesar Indonesia satu dekade terakhir: mencampur 50% FAME berbasis sawit ke dalam solar, menghentikan impor solar (sebelumnya 3–4 juta kL/tahun), dan mengalihkan belasan juta ton CPO dari pasar ekspor ke pasar domestik. Sejak awal, pemerintah menjualnya bukan hanya sebagai kebijakan energi, melainkan kebijakan kesejahteraan petani.

1.1 Kronologi menuju B50

Waktu	Peristiwa
17 Mei 2025	Pungutan ekspor (PE) CPO naik 7,5% → 10% (PMK 30/2025) — eksplisit untuk mendanai B40 dan peremajaan sawit rakyat (PSR).
23 Des 2025	Alokasi biodiesel 2026 ditetapkan 15,65 juta kL (basis B40): PSO 7,45 juta kL, non-PSO 8,19 juta kL.
14 Jan 2026	Rencana B50 per Januari 2026 dibatalkan (kesiapan teknis & pendanaan); pemerintah mengumumkan PE akan dinaikkan ke 12,5%.
1 Mar 2026	PE 12,5% berlaku (PMK 9/2026) — mengamankan pendanaan mandatori; beban ekspor bertambah.
Apr–Jun 2026	Percepatan B50 didorong Menteri ESDM dengan framing kemandirian energi di tengah konflik Timur Tengah.
1 Jul 2026	B50 resmi berlaku (Kepmen ESDM No. 257.K/EK.01/MEM.E/2026); masa transisi 3 bulan; B50 dijual seharga solar subsidi Rp6.800/liter.
9 Jul 2026	Peresmian oleh Presiden Prabowo di Rest Area KM 57 Tol Japek: “tolok ukur keberhasilan B50 adalah kesejahteraan petani”.
1 Okt 2026	Seluruh SPBU wajib menyalurkan B50 penuh; proyeksi alokasi FAME 2026 naik menjadi 17,6 juta kL.

1.2 Logika ekonomi yang dijanjikan

Teori perubahannya lugas: kebutuhan CPO domestik untuk biodiesel naik dari ±15,2 juta menjadi 16,3–17 juta ton (tambahan riil semester II-2026 ±1,74 juta ton versi GAPKI), ekspor berkurang 1,7–2 juta ton, pasokan global mengetat, harga CPO naik, dan lewat formula harga TBS petani ikut menikmati. Menteri ESDM: “kita sisihkan untuk bangun hilirisasi B50 supaya harga petani naik, industri naik, negara sejahtera.” Apkasindo bahkan memproyeksikan TBS menembus ±Rp3.600/kg pada akhir Juli, dengan rumus praktis: setiap kenaikan CPO Rp1.000/kg mengangkat TBS ±Rp300/kg.

GAPKI memberi catatan sejak awal: efek positif itu hanya terjadi bila pemerintah tidak menaikkan pungutan ekspor lagi. Bila penerimaan Dana Sawit turun karena ekspor menyusut lalu PE dinaikkan untuk menambalnya, dampaknya “justru dapat berbalik menekan harga CPO dalam negeri dan juga harga TBS petani”. Catatan inilah yang, tiga pekan kemudian, terbukti menjadi inti persoalan.

2. Fakta — Apa yang Sebenarnya Terjadi dengan Harga

2.1 Di pasar CPO: menguat tahunan, melandai bulanan

- Harga referensi (HR) CPO Kemendag Juli 2026: US\$1.000,90/ton — turun 2,78% dari Juni (US\$1.029,51), tetapi masih +20,2% dibanding Juni 2025 (US\$856,38). Level 2026 secara umum jauh di atas 2025.
- Harga tender KPBN (acuan formula TBS) hanya merangkak: Rp15.545 (2 Juli) → Rp15.700/kg (17 Juli); sejumlah tender berakhir withdraw (penjual menarik diri karena penawaran rendah).
- Bursa Malaysia (FCPO) kontrak acuan ±MYR4.573/ton (≈US\$1.122) pada pertengahan Juli — ditopang harga minyak mentah dan risiko El Niño.

2.2 Di harga penetapan: naik, tetapi timpang antarwilayah

Provinsi	Periode Juli 2026	TBS penetapan (Rp/kg)	Catatan
Riau — plasma	8–14 Jul / 22–28 Jul	3.859,87 / ±3.930	Tertinggi nasional
Riau — swadaya terlembaga	15–21 Jul / 22–28 Jul	3.832,75 / 3.846,00	Hanya ±1,7% di bawah plasma
Sumatera Utara	15–21 Jul	3.925,49	Naik Rp42,50 dari pekan sebelumnya
Jambi (tingkat pabrik)	10–16 Jul	3.856,89	—
Sumatera Selatan	Periode I Jul	3.750,70	Indeks K 93,65%
Kalimantan Barat	Periode II Jul	3.599,27	CPO penetapan Rp15.191,91
Kalimantan Tengah	Periode II Jun	3.609,44 (plasma)	Swadaya resmi: 3.304,66 (–8,4%)
Sulawesi Barat	Berlaku 15 Jul	3.276,60	—

2.3 Di gerbang kebun swadaya: angka yang berbeda

- **Rata-rata nasional (pekan 20 Juli):** swadaya ±Rp3.200/kg vs mitra ±Rp3.500/kg. Titik terendah pasca-anjlok Mei: Rp2.600–2.850/kg.
- **Jambi (12 Juli):** penetapan Rp3.856,89 hanya berlaku di gerbang pabrik; petani mandiri yang menjual lewat tengkulak/toke menerima ±Rp2.700–3.400/kg — gap Rp457–1.157/kg (12–30%).
- **Bengkulu Selatan (11 Juli):** harga riil pabrik Rp2.700–2.800/kg. Babel: stagnan pasca-B50, sebagian pabrik hanya menaikkan ±Rp30/kg.
- **Pekan ketiga Juli di Riau:** kenaikan harga penetapan justru ditopang harga kernel (inti sawit), bukan CPO — sinyal bahwa mesin utama transmisi (CPO domestik) masih macet.

2.4 Fundamental yang melatari

- Produksi CPO Jan–Mei 2026: 25,01 juta ton (+10,68% y/y) — pasokan domestik melimpah.
- Ekspor Mei 2026: 1,996 juta ton (–28,14% m/m); stok akhir Mei naik ke 3,042 juta ton — tertinggi dalam data GAPKI terkini.
- Permintaan global lesu: impor sawit India terendah 14 bulan (beralih ke minyak kedelai yang murah pasca-penghapusan bea ekspor Argentina); permintaan China terbatas.
- Konsumsi biodiesel domestik Mei: 1,035 juta ton CPO — B50 mulai menyerap, menopang harga domestik di tengah pelemahan global.

Kesimpulan Bab 2

Harga tidak sedang “tidak naik” — harga penetapan naik moderat dan berada jauh di atas level 2025. Yang terjadi adalah kenaikan yang tidak terdistribusi: petani yang tersambung ke kelembagaan dan formula resmi menikmati; petani swadaya non-mitra — mayoritas — membayar selisih 12–30% kepada rantai di atasnya, tepat ketika beban fiskal ekspor berada di titik tertinggi.

3. Diagnosis — Lima Lapis Pemutus Transmisi Harga

Kerangka kajian ini menelusuri perjalanan harga dari pasar global sampai gerbang kebun dan menemukan lima titik putus yang bekerja serentak. Masing-masing lapis punya mekanisme, bukti, dan besaran dampak yang bisa diukur — artinya masing-masing juga punya obat yang spesifik.

Lapis 1 — Baji fiskal: petani ikut membiayai B50

- **Mekanisme.** Subsidi selisih harga biodiesel (HIP biodiesel Rp14.562 vs HIP solar Rp13.442/liter) dibayar BPDPKS dari pungutan ekspor. Semakin besar mandatori, semakin besar kebutuhan dana — dan PE telah dinaikkan dua kali dalam 14 bulan: 7,5%→10% (Mei 2025), lalu 10%→12,5% (Maret 2026, diumumkan bersamaan penundaan B50).
- **Besaran.** Dengan HR US\$1.000,90/ton, beban BK US\$148 + PE ±US\$125 = ±US\$273/ton (±27% dari HR). SPKS menghitung dampaknya ±Rp833/kg TBS; kerugian petani 2 ha ±Rp1,6 juta/bulan; agregat ±Rp500 miliar/bulan. Verifikasi aritmetika kajian ini sejalan (orde besaran): US\$273/ton ≈ Rp4.900/kg CPO (kurs Rp17.950) × rendemen 20,5% ≈ Rp1.000/kg TBS.
- **Loop fiskal yang berbahaya.** B50 memangkas ekspor → basis pungutan menyusut (penerimaan Dana Sawit diperkirakan turun Rp43–67 T/tahun; potensi defisit Rp28–42 T/tahun) → muncul tekanan menaikkan PE lagi (analisis: perlu ±23,8% bila Brent US\$85) → harga domestik tertekan lebih dalam. Pagu insentif biodiesel 2026 memang turun ke Rp32 T (dari Rp47 T) karena selisih HIP menyempit, tetapi satu koreksi harga minyak bumi cukup untuk membalikkan matematika ini.

Implikasi: selama arsitektur pendanaannya tidak diubah, setiap kenaikan mandatori menaikkan permintaan dan pungutan sekaligus — petani menerima manfaat lewat satu tangan dan membayarnya lewat tangan yang lain.

Lapis 2 — Sumbatan transmisi domestik: acuan yang lengket

- **Mekanisme.** Formula harga TBS (Permentan 13/2024, Pasal 16) memakai rata-rata harga tender KPBN sebagai acuan CPO. Bila tender “tertahan” — penawaran rendah, penjual withdraw, transaksi tipis — seluruh rantai formula ikut tertahan, berapa pun harga dunia.
- **Bukti.** Sepanjang Juli KPBN hanya bergerak Rp15.545→15.700/kg dengan banyak tender withdraw, saat FCPO Malaysia menguat. Apkasindo menunjuk mekanisme tender sebagai penahan transmisi. Secara ekonometrik, studi AECM atas data 2010–2021 membuktikan transmisi CPO→TBS asimetris di jangka pendek: penurunan diteruskan cepat, kenaikan ditahan.
- **Nuansa penting.** Harga domestik saat ini justru sudah ±Rp2.640/kg di atas paritas netback ekspor (Rp15.700 vs ±Rp13.060) — bukti permintaan B50 bekerja. Tetapi ia tetap ±Rp2.270/kg (–13%) di bawah harga referensi CPO (±Rp17.970) karena baji fiskal membuat arbitrase ekspor tidak sepenuhnya menguntungkan. Harga domestik “mengambang di antara dua paritas” — dan mekanisme tender menentukan ia mengambang di sisi bawah.

Lapis 3 — Eksklusi kelembagaan: formula yang tidak mengikat mayoritas

- **Mekanisme.** Sejak Permentan 01/2018 hingga penggantinya Permentan 13/2024, harga penetapan provinsi hanya mengikat transaksi pekebun bermitra (perjanjian tertulis dengan PKS). Petani swadaya tanpa mitra — $\pm 80\%$ dari 6,8–6,9 juta ha kebun rakyat — bertransaksi di pasar spot tanpa payung harga.
- **Bukti.** Apkasindo: hanya $\pm 6,8\%$ petani menikmati harga penetapan; di Riau 97% petani swadaya. Kalteng bahkan menetapkan dua harga resmi: plasma Rp3.609 vs swadaya Rp3.305 ($-8,4\%$). Indeks K disusun tanpa transparansi biaya perusahaan, dan sanksi bagi PKS pembangkang lemah.
- **Bukti tandingan yang menguatkan.** Ketika swadaya masuk kelembagaan (Riau: “mitra swadaya” melalui koperasi/gapoktan ber-DO), gap terhadap plasma menyusut menjadi $\pm 1,7\%$. Masalahnya bukan “swadaya”, melainkan ketidakersambungan pada institusi harga.

Lapis 4 — Rantai perantara dan praktik pasar: potongan di setiap meja

- **Mekanisme.** Struktur baku rantai swadaya: Petani → Pengumpul → Pemegang DO → PKS (studi KEHATI/SPOS) — minimal dua lapis margin sebelum gerbang pabrik. Akses DO dikuasai segelintir pemasok; di Kaltim jaringan “loding” mengendalikan akses PKS.
- **Bukti dan besaran.** 83% petani berlahan < 8 ha menjual ke tengkulak (SPKS); selisih terdokumentasi 20–30% di bawah penetapan; potongan timbangan PKS 9–12%; klaim rendemen tak pernah dipublikasikan. Kasus paling telanjang — Pesisir Selatan 2026: petani menerima $\pm$ Rp3.000 vs penetapan Rp4.180/kg (kerugian $\pm$ Rp492 M/tahun); KPPU tengah menyelidiki dugaan kartel.
- **Penegakan mulai bergerak, hasil belum.** Wamentan mengultimatum 139 PKS penurunan harga sepihak; Mentan bersama Satgas Pangan Polri memeriksa 300 perusahaan. Hingga kajian ini ditulis, hasil verifikasi dan sanksi belum diumumkan — kredibilitas ancaman masih diuji pasar.

Lapis 5 — Jerat struktural kebun swadaya: posisi tawar dari akarnya

- **Produktivitas & genetik.** Kebun swadaya menghasilkan 7–13 ton TBS/ha/tahun — sepertiga potensi; banyak memakai benih Dura tak bersertifikat (rendemen 14,4% vs Tenera 20,2%). Realisasi rendemen 17–19% vs target 23–24% menjadi dalih abadi PKS menekan harga.
- **Legalitas & sertifikasi.** 67% petani belum ber-STDB (69% tak tahu koordinat kebunnya); $< 1\%$ swadaya ber-ISPO padahal wajib per Maret 2029 (Perpres 16/2025); EUDR (berlaku 30 Des 2025/2026) menuntut geolokasi — tanpa itu, buah swadaya tak bisa masuk rantai formal bersertifikat dan terkunci di jalur tengkulak.
- **Regenerasi macet.** Realisasi PSR 2024 hanya 34,2 ribu ha dari target 120–180 ribu ha — terhambat status kawasan hutan, dan petani menunda replanting justru saat harga tinggi. Tanpa peremajaan, produktivitas dan mutu buah akan terus menjadi alasan diskon.

Lapis konteks — Fundamental global (pemberat, bukan akar)

Produksi +10,7% ytd, stok 3,04 juta ton, India di titik terendah 14 bulan, China lesu, dan minyak kedelai Argentina yang agresif — semuanya menekan momentum harga acuan. Ini bukan kegagalan tata niaga domestik, tetapi ia menjelaskan mengapa “dorongan B50” tidak cukup kuat menutupi lima kebocoran di atas: B50 menahan rantai harga, bukan meroketkan langit-langitnya.

Peta bukti — seberapa kuat tiap hipotesis

KUAT: baji fiskal PE 12,5% (angka konsisten lintas SPKS/GAPKI/median media); eksklusi kelembagaan & gap swadaya (terkonfirmasi data harga mingguan multi-provinsi).

SEDANG–KUAT: sumbatan tender KPBN (data komparatif jelas; audit mekanisme belum ada).

SEDANG: perilaku PKS di bawah acuan (139–300 diperiksa, hasil belum diumumkan); fundamental global; risiko defisit BPDPKS (proyeksi).

LEMAH: teori “efek B50 sudah priced-in sejak pengumuman” — tidak ditemukan dukungan empiris eksplisit.

4. Anatomi Harga — Ke Mana Perginya Selisih Itu

Dua “air terjun” berikut merangkum keseluruhan cerita dalam angka Juli 2026. Acuan konversi memakai Harga Referensi CPO Kemendag (US\$1.000,90/ton — basis resmi penghitungan BK & PE) pada kurs Rp17.950/US\$ (nilai tukar pasar per 22 Juli 2026); dekomposisi bersifat indikatif berbasis sumber di Bab 2–3.

4.1 Dari harga referensi ekspor ke harga CPO domestik (Rp/kg CPO)

Tahapan	Rp/kg	Keterangan
Harga Referensi CPO Kemendag (US\$1.000,90/ton)	±17.970	Basis resmi ekspor, Juli 2026 × kurs Rp17.950
– Bea keluar (US\$148/ton)	–2.660	Progresif terhadap harga referensi
– Pungutan ekspor 12,5% (US\$125/ton)	–2.250	Naik dari 7,5% (2024) → 12,5% (Mar 2026)
= Paritas netback ekspor (FOB neto)	±13.060	Lantai harga domestik tanpa B50
+ Premi permintaan domestik (B50)	+2.640	B50 menarik harga di atas netback — bukti kebijakan bekerja di level CPO
= Harga tender KPBN aktual	15.700	Masih ±Rp2.270 (–13%) di bawah harga referensi

Bacaannya: negara menarik ±Rp4.900/kg dari setiap kg CPO yang diekspor; permintaan B50 “mengembalikan” ±Rp2.640 ke harga domestik; sisanya — ±Rp2.270/kg (–13%) — adalah diskon struktural yang ditanggung seluruh produsen dalam negeri, termasuk petani. Catatan: pelemahan rupiah mengangkat harga referensi dalam rupiah, sehingga baik nilai pungutan maupun premi domestik ikut membesar — tetapi selisih bersih yang hilang bagi produsen domestik tetap ±Rp2.300/kg.

4.2 Dari harga penetapan ke kantong petani swadaya (Rp/kg TBS)

Tahapan	Rp/kg	Keterangan
Harga penetapan Disbun (Riau, 15–21 Jul)	3.832,75	Mengikat hanya transaksi kemitraan
Petani swadaya terlembaga (koperasi ber-DO)	±3.780	Gap ±1,7% — kelembagaan hampir menutup selisih
Petani swadaya non-mitra via tengkulak	2.700–3.400	Gap 12–30% terhadap penetapan
· margin rantai 2+ lapis (pengumpul, pemegang DO)	–200 s.d. –450	Studi KEHATI/SPKS: 83% petani lewat tengkulak

Tahapan	Rp/kg	Keterangan
· potongan timbangan & sortasi PKS	–300 s.d. –450	Potongan 9–12% terdokumentasi (Pesisir Selatan)
· markdown mutu/rendemen (Dura, buah restan)	–100 s.d. –300	Rendemen riil 17–19% vs target 23–24%; uji tak dipublikasikan

Aritmetika ketidakadilan

Dari setiap Rp1.000 kenaikan harga CPO dunia, formula resmi seharusnya meneruskan $\pm$ Rp300 ke TBS (rumus praktis Apkasindo). Bagi petani non-mitra, potongan rantai 12–30% berarti yang benar-benar tiba di kantong hanya $\pm$ Rp210–260 — dan itu pun dengan jeda, karena transmisi kenaikan terbukti lebih lambat daripada transmisi penurunan.

5. Skenario 6–18 Bulan ke Depan

Arah harga TBS swadaya ditentukan tiga variabel: (1) keputusan PE/fiskal BPDPKS, (2) keseriusan penegakan tata niaga, (3) arah pasar global (stok, India–China, El Niño, harga minyak bumi). Tiga skenario berikut memformalkannya (probabilitas indikatif).

Skenario	Pemicu utama	TBS penetapan (Rp/kg)	TBS riil swadaya (Rp/kg)
BASE (±50%)	B50 penuh 1 Okt; PE tetap 12,5%; penegakan setengah jalan; global datar	3.850–4.100	3.200–3.600 — gap 12–20% bertahan
BULL (±25%)	Serapan FAME 17,6 jt kL mulus; moratorium PE; sanksi PKS kredibel; El Niño mengetatkan pasokan global	4.100–4.400	3.700–4.100 — gap menyempit <10%
BEAR (±25%)	Brent turun → insentif bengkak (estimasi Rp41 T) → PE dinaikkan (skenario 15–23,8%); stok 3 jt ton + India lesu memicu koreksi	3.300–3.600	2.600–3.000 — asimetri bekerja: turun lebih cepat dari acuan

Sinyal dini yang wajib dipantau bulanan: revisi PMK tarif PE; realisasi blending & alokasi FAME kuartal IV; stok CPO GAPKI; spread KPBN vs FCPO; selisih HIP biodiesel–solar (proksi kebutuhan subsidi); pengumuman hasil pemeriksaan 300 perusahaan.

6. Agenda Aksi — Rekomendasi per Horizon dan Aktor

Empat prinsip desain: (1) sambungkan yang belum tersambung — kelembagaan adalah pengungkit dengan bukti terkuat; (2) kembalikan sebagian dividen B50 ke hulu secara eksplisit; (3) transparansi adalah disinfektan termurah; (4) jaga keberlanjutan fiskal — menaikkan PE untuk menambal defisit adalah kebijakan yang memakan tujuannya sendiri.

Horizon 1 — 100 hari pertama (quick wins penegakan & transparansi)

Aksi	Pemilik	Dampak yang diharapkan
Tegaskan harga penetapan sebagai harga minimum semua transaksi PKS (mitra & non-mitra) via revisi Kepdirjenbun/Permentan	Kementan, Ditjenbun, Pemda	+Rp300–600/kg bagi petani non-mitra
Tuntaskan & umumkan hasil pemeriksaan 139–300 PKS; sanksi dipublikasikan mingguan	Kementan, Satgas Pangan, KPPU	Efek gentar; kepatuhan harga acuan
Audit independen mekanisme tender KPBN (fenomena withdraw); publikasi hasil tender real-time	KPBN/BUMN Perkebunan, BPKP	Acuan formula lebih jujur; +Rp0–200/kg
Moratorium kenaikan PE 12 bulan, diumumkan resmi	Kemenkeu, BPD PKS, Kemenko	Mencegah tekanan –Rp400+/kg (skenario bear)
Dashboard publik harga riil vs penetapan di 168 kabupaten (crowdsourcing + verifikasi Disbun)	Ditjenbun, Pemda, asosiasi petani	Data gap menjadi alat tekan publik

Horizon 2 — 6–18 bulan (rewiring kelembagaan & insentif)

Aksi	Pemilik	Dampak yang diharapkan
Korporatisasi swadaya: 500 ribu petani masuk koperasi/gapoktan ber-DO langsung ke PKS (target cakupan harga penetapan 6,8% → 30%)	Kementan, Kemenkop, Pemda, Apkasindo/SPKS	+Rp400–800/kg bagi peserta (benchmark Riau: gap tinggal 1,7%)
“Dividen B50”: insentif harga dari BPD PKS untuk TBS ber-STDB dari kelembagaan (mis. +4% dari harga penetapan) + rabat PE bagi PKS yang membeli langsung dari koperasi petani	BPD PKS, Kemenkeu	Realokasi eksplisit manfaat mandatori ke hulu
Akselerasi E-STDB massal (67%	Ditjenbun, BPD PKS, Pemda	Tiket masuk rantai formal &

Aksi	Pemilik	Dampak yang diharapkan
belum ber-STDB) & ISPO kolektif dibiayai BPDPKS (wajib 2029)		pasar EUDR
Transparansi formula: audit publik komponen Indeks K; kewajiban publikasi uji rendemen per PKS	Tim Harga Provinsi, Disbun	Menghapus dalih diskon mutu sepihak
Reformasi acuan: migrasi bertahap formula TBS dari tender KPBN ke acuan bursa domestik yang likuid	Kemendag, ICDX/bursa, Ditjenbun	Acuan tak bisa “ditahan”; transmisi simetris

Horizon 3 — 3–5 tahun (transformasi struktural)

Aksi	Pemilik	Dampak yang diharapkan
PSR “big push”: dari realisasi 34 ribu → ≥120–180 ribu ha/tahun dengan benih Tenera bersertifikat + penyelesaian status kawasan	BPDPKS, Kementan, KLHK/ATR	Rendemen 14→20%+; pendapatan/ha naik 30–40%
PKS mini/koperasi & penyertaan saham petani pada PKS baru di sentra swadaya	BPDPKS, Kemenkop, swasta	Petani menangkap margin olah; oligopsoni terkikis
Traceability penuh rantai swadaya (geolokasi–DO–rendemen) terintegrasi ISPO/EUDR	Ditjenbun, GAPKI, buyer global	Akses pasar premium; posisi tawar struktural
Kebijakan mandatori berbasis aturan: formula PE counter-cyclical (naik saat harga tinggi, turun saat rendah) ditetapkan di muka	Kemenkeu, BPDPKS, DPR	Menghentikan loop “defisit → PE naik → harga jatuh”

7. Risiko Implementasi dan KPI Pemantauan

7.1 Lima risiko utama

- **Risiko fiskal BDPKS.** Defisit Rp28–42 T/tahun bila harga minyak bumi turun/serapan melonjak → godaan menaikkan PE. Mitigasi: moratorium + formula counter-cyclical + prioritas ulang belanja (insentif biodiesel vs PSR/insentif petani).
- **Risiko pangan (minyak goreng).** Konsumsi pangan turun 3,64% dan stok akhir turun 19,8% — bila harga migor terkerek, tekanan politik bisa membalikkan dukungan terhadap B50. Mitigasi: DMO migor terukur + monitoring stok bulanan.
- **Risiko penegakan setengah hati.** Ultimatum tanpa sanksi terpublikasi akan dibaca pasar sebagai gertakan; 139–300 pemeriksaan harus berujung keputusan. Mitigasi: KPI penegakan terbuka.
- **Risiko data.** Harga riil swadaya tidak tercatat sistematis — kebijakan dinilai dari harga penetapan yang tidak dialami mayoritas. Mitigasi: dashboard 168 kabupaten (H1).
- **Risiko pasar 2027.** Produksi +10,7% dan permintaan India–China lemah; koreksi global akan menghantam swadaya lebih cepat (asimetri). Mitigasi: percepatan kelembagaan sebelum siklus turun.

7.2 Dashboard KPI (baseline Juli 2026 → target 12–18 bulan)

Indikator	Baseline (Jul 2026)	Target 12–18 bulan
Gap harga riil swadaya vs penetapan	12–30%	<10%
Cakupan petani menikmati harga penetapan	±6,8%	≥30%
Beban fiskal ekspor (BK+PE, % dari HR)	±27%	Tidak naik; roadmap turun bertahap
Spread KPBN vs harga referensi CPO	±Rp2.270/kg (–13%)	≤Rp1.500/kg
Realisasi PSR per tahun	34,2 ribu ha (2024)	≥120 ribu ha
Petani ber-STDB	±33%	≥70% (jalur E-STDB)
PKS diperiksa → diputus & dipublikasikan	300 diperiksa, 0 diumumkan	100% berstatus, publikasi mingguan

8. Metodologi dan Batasan Kajian

- Riset daring multi-jalur dilakukan pada 22 Juli 2026 melalui empat jalur paralel: (1) kebijakan & pendanaan B50; (2) data harga CPO/TBS 2025–2026; (3) struktur rantai pasok swadaya & studi transmisi; (4) diskursus publik Maret–Juli 2026. Total 35+ sumber primer dikurasi (regulasi, rilis resmi, data asosiasi, media kredibel, studi akademik).
- Harga riil petani swadaya tidak tersedia dalam statistik resmi yang sistematis; kajian memakai sampel pemberitaan terverifikasi multi-provinsi (Jambi, Bengkulu, Babel, Riau, Kalteng) — rentang 12–30% adalah rentang antar-kasus, bukan rata-rata tertimbang.
- Klaim yang tidak konsisten direkonsiliasi ke data resmi. Contoh: klaim spread Rotterdam $\pm$ Rp28.790/kg (Apkasindo) tidak konsisten dengan CIF Rotterdam GAPKI (US\$1.453/ton, Mei) dan FCPO ($\pm$ US\$1.122, Juli); kajian memakai data resmi dan mengutip klaim asosiasi hanya secara kualitatif.
- Waterfall Bab 4.1 memakai Harga Referensi CPO Kemendag (US\$1.000,90/ton — basis resmi BK & PE) dikonversi pada kurs Rp17.950/US\$ (nilai tukar pasar 22 Juli 2026; kisaran Juli Rp17.925–18.090 per BI/Bisnis/Kompas). Angka ini bukan asumsi tetap: pada edisi awal kajian sempat dipakai kurs Rp16.300 yang keliru (kurs lama), lalu dikoreksi. Perubahan kurs menggeser nominal pungutan dan premi domestik, tetapi tidak mengubah selisih bersih $\pm$ Rp2.300/kg maupun angka rupiah nyata (harga TBS, KPBN, –Rp833/kg versi SPKS).
- Perhitungan paritas/netback memakai rendemen 20,5%; dekomposisi waterfall Bab 4.2 bersifat indikatif berdasarkan studi SPKS/KEHATI dan kasus terdokumentasi 2026.
- Probabilitas skenario Bab 5 adalah penilaian analitis (judgment) untuk keperluan diskusi, bukan hasil model statistik.

Daftar Sumber

Seluruh tautan diakses dan diverifikasi pada 22 Juli 2026. Pengelompokan tematik; penomoran menerus.

Regulasi & keputusan

1. Kepmen ESDM No. 257.K/EK.01/MEM.E/2026 — pemberlakuan B50 per 1 Juli 2026 (via sawitindonesia.com, Jul 2026)
2. PMK No. 30/2025 — kenaikan PE CPO 7,5%→10% per 17 Mei 2025 (money.kompas.com, 14 Mei 2025)
3. PMK No. 9/2026 — kenaikan PE CPO 10%→12,5% per 1 Maret 2026 (pajakku.com; hydrocarbonprocessing.com, 14 Jan 2026)
4. Permentan No. 13/2024 — Pembelian TBS Produksi Perkebunan Mitra, mencabut Permentan 01/2018 (jdih.pertanian.go.id; aspekpir.org)
5. Kepdirjenbun No. 144/Kpts./PP.320/E/12/2025 — juknis harga TBS (jambiekspres.disway.id)
6. Perpres No. 16/2025 & Permentan No. 33/2025 — ISPO wajib petani swadaya per Maret 2029 (infosawit.com, 7 Jul 2025; gapki.id)
7. Kepmen ESDM No. 439.K/2025 — alokasi biodiesel 2026 sebesar 15,65 juta kL (esdm.go.id, 23 Des 2025)

Data & statistik

8. GAPKI — Kinerja Mei 2026: ekspor 1,996 jt ton (–28,14% m/m), stok 3,042 jt ton (gapki.id, 15 Jul 2026)
9. GAPKI — Kinerja 2025: produksi 51,66 jt ton; Jan–Mei 2026 +10,68% y/y (gapki.id, 13 Mar 2026; kontan.co.id)
10. HR CPO Juli 2026 US\$1.000,90/MT; BK US\$148/MT; PE 12,5% (infosawit.com, 1 Jul 2026; 31 Mei 2026)
11. Harga tender KPNB Juli 2026 Rp15.545–15.700/kg (agricom.id, 8–17 Jul 2026; sumatera.infosawit.com, 4 Jul 2026)
12. FCPO Bursa Malaysia ±MYR4.573 (≈US\$1.122) (agropost, 14 Jul 2026; palmoilmagazine.com, 8 Jul 2026)
13. TBS Riau: mediacenter.riau.go.id; halloriar.com (21 Jul 2026); bualbual.com (22 Jul 2026)
14. TBS Sumut Rp3.925,49 (infosawit.com, 17 Jul 2026); TBS Jambi (jambiekspres.disway.id; jambione.com, 12 Jul 2026)
15. TBS Sumsel Rp3.750,70; Indeks K 93,65% (sumatra.bisnis.com, 9 Jul 2026); TBS Kalbar (suarakalbar.co.id; infosawit.com, 18 Jul 2026)
16. TBS Kalteng plasma vs swadaya (disbun.kalteng.go.id; agricom.id); Sulbar (radarmamuju.com); Bengkulu Selatan (bengkulu.tribunnews.com, 11 Jul 2026); Babel (bangka.tribunnews.com)
17. HIP biodiesel Rp14.562 vs HIP solar Rp13.442 per liter, Juli 2026 (katadata.co.id; metrotvnews.com)
18. Kurs USD/IDR Juli 2026 Rp17.925–18.090 (market.bisnis.com, 22 Jul 2026; money.kompas.com, 10–17 Jul 2026; metrotvnews.com, 20 Jul 2026; investing.com)

Pemberitaan kebijakan & diskursus

19. Kompas — “Harga B50 Rp6.800, Petani Minta Hal Ini” — hitungan SPKS –Rp833/kg (money.kompas.com, 1 Jul 2026)
20. Kompas — “B50 Resmi Berlaku, Akankah Harga CPO dan TBS Naik?” (money.kompas.com, 9 Jul 2026)
21. GAPKI — “Implementasi B50 Berpotensi Dongkrak Harga... Dengan Catatan” (gapki.id, 7 Jul 2026; ekonomi.bisnis.com, 7 Jul 2026)
22. SawitSetara — “Sudah Tiga Pekan, Kenapa Harga TBS Belum Terdongkrak” (sawitsetara.co, 20 Jul 2026)

23. SawitSetara — “APKASINDO Soroti Ketimpangan Harga TBS di Era B50” — angka 6,8% (sawitsetara.co, 21 Mei 2026)
24. Sawit Indonesia — “Harga TBS Belum Pulih, APKASINDO Minta Korporasi Tepati Komitmen” (sawitindonesia.com, 4 Jun 2026)
25. InfoSAWIT — “Pemerintah Evaluasi Dampak B50, Dana BPDP Dipastikan Cukup” (infosawit.com, 20 Jul 2026)
26. CNBC Indonesia — “Wamentan Ultimatum Pabrik Kelapa Sawit” — 139 PKS (cnbcindonesia.com, 26 Mei 2026)
27. Matamata/Okezone — Mentan & Satgas Pangan periksa 300 perusahaan (8 Jun 2026); ancaman cabut izin PKS (infosawit.com, 31 Mei 2026)
28. Kompas — insentif biodiesel 2026 turun ke Rp32 T (19 Jun 2026); BPDP: kebutuhan Q3 Rp3,44 T, dana aman (16 Jul 2026; kontan.co.id)
29. Suara.com — skenario PE 23,8% bila Brent US\$85 (30 Jun 2026); Bloomberg Technoz — estimasi PASPI $\geq$ Rp10 T (2026)
30. Beritasatu — kutipan Bahlil; Sawit Indonesia — Prabowo: tolok ukur kesejahteraan petani (Jul 2026)
31. Hydrocarbonprocessing — B50 ditunda, PE dinaikkan (14 Jan 2026); haisawit.co.id — APROBI minta kapasitas +4 jt kL
32. Kompas.tv — Bahlil: kebutuhan CPO naik hingga 17 jt ton; CNBC Research — jejak biodiesel (30 Jun 2026)

Studi & laporan rantai pasok

33. KEHATI/SPOS Indonesia — “Studi Rantai Pasok TBS Sawit Swadaya” (Riau, Jambi, Kalteng; Jan 2019) — struktur 4 aktor
34. SPKS (2018) via VOA Indonesia (2021) — 83% petani <8 ha menjual ke tengkulak; selisih 20–30%
35. Transmisi Asimetris Harga TBS–CPO Domestik, model AECM 2010–2021 (ResearchGate, 2025)
36. IOPRI/Warta (2023) — rendemen Tenera 20,2% vs Dura 14,4% pada buah petani Jambi
37. Harian Haluan (Apr 2026) & InfoSAWIT Sumatera (30 Jun 2026) — kasus Pesisir Selatan; penyelidikan KPPU
38. InfoSAWIT (18 Feb 2025) — realisasi PSR 34,24 ribu ha; GIMNI/INDEF — 67% tanpa STDB, ancaman EUDR (2025–2026)
39. Liputan6 (2024) — 6,8 juta ha kebun rakyat; Kompas.id (2025–2026) — produktivitas & “Ironi Sawit Rakyat”